

Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis

Oleh : Mahmuddin¹

Abstrak

Tidak ada kegiatan ekonomi Indonesia yang memiliki kisah semuram sektor pertanian. Dari masalah bencana alam hingga masalah runyamnya pelaku pembangunan pertanian (petani) atas berbagai program yang dikembangkan pemerintah terhadap sektor pertanian. Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor pertanian yang masih terus bertaban hingga saat ini. Berbagai program yang diterapkan tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, namun juga meninggalkan kepincangan yang cukup berarti dalam pembangunan pertanian. Perkembangan ragam paradigma pembangunan pertanian yang kemudian lebih dikenal sebagai basis pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu jawaban atas ketidakmampuan paradigma revolusi hijau yang menyisakan berbagai polemik atas persoalan pertanian di tanah air.

Kata Kunci : Pembangunan Pertanian, Revolusi Hijau, Pertanian Berkelanjutan

A. Pendahuluan

Pembicaraan atau diskusi masalah pembangunan pertanian bukanlah barang baru bagi masyarakat. Bukan hanya kaum ilmuwan, budayawan namun juga politikus hingga pelaku pertanian sendiri (petani) mempunyai ragam pemikiran terhadap masalah pembangunan pertanian. Keberhasilan revolusi hijau yang didevakan pemerintah orde baru misalnya, selain mampu meningkatkan swasembada pangan dan terbebas dari masalah kelaparan, namun tidak luput juga perubahan radikal yang dialami petani lewat revolusi hijau. Dari persoalan rusaknya agro-ekosistem persawahan, merebaknya penggunaan pestisida yang berlebih sehingga serangan hama yang cukup tinggi hingga trauma sosial psikologi akibat ketergantungan dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian.

Perubahan paradigma pembangunan pertanian pada awalnya sudah dimulai sejak tahun 1920-an dimana tumbuh rasa kesadaran untuk mempertimbangkan aspek biologi dan ekologi dalam pengelolaan industri pertanian. Pada tahun 1930-an di Amerika muncul konsep pertanian lingkungan sebagai solusi atas ke-

1. Dosen Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

munduran produktivitas lahan dan bencana erosi yang melanda beberapa negara bagian. Tahun 1940-an mulailah berkembang konsep keseimbangan antara penggunaan teknologi kimia dan biologi pada sektor pertanian. Tahap perkembangan ini terus mengalami kemajuan yang pesat hingga penggunaan bahan kimia dan teknologi pertanian terus meningkat pada dekade 1970-an.

Kebijakan ini pula yang ikut mempengaruhi format pertanian di Indonesia. Konsep pertumbuhan yang berorientasi ekonomi dengan melakukan suntikan besar-besaran terhadap berbagai peningkatan usaha tani mulai dari subsidi harga pupuk, pemberian bibit cuma-cuma memperkenalkan teknologi usaha produksi pertanian hingga gencarnya penyuluhan pertanian yang membawa perubahan radikal di komunitas petani untuk beralih dari pola pertanian tradisional (subsisten) ke pertanian modern.

Kendatipun demikian niat baik yang dilakukan pemerintah tidak hanya berdampak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi bangsa, namun sekaligus secara tidak sengaja menyebabkan timbulnya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah dan sekaligus mematikan nilai-nilai lokal petani dalam pembangunan pertanian yang digantikan oleh jargon ekonomi global yang meniadakan hubungan manusia dengan ekosistem alam sebagai hubungan yang simetris dan bukan saling ketergantungan satu sama lain.

Kondisi inilah yang memunculkan stigma dari banyak pihak untuk memikirkan ulang pola pembangunan pertanian yang tidak hanya menguntungkan bagi pelaku sendiri dalam hal petani, namun juga sekaligus mampu membangun hubungan sinergis aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan pertanian. Berangkat dari hal tersebut, tulisan singkat ini diarahkan untuk menjembatani paradigma yang sudah banyak diterapkan di negara berkembang lain dengan sistem pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai jawaban atas persoalan semua persoalan pembangunan pertanian yang berkembang di Indonesia sejak masa warisan kolonial dari pemerintah Belanda hingga jargon pendewaan revolusi hijau pada masa pemerintahan orde baru.

B. Pertanian Indonesia : Catatan Historis

Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor pertanian yang masih terus bertahan hingga saat ini. Apabila menelusuri lebih jauh pertanian yang berkembang di Indonesia dari waktu ke waktu selalu mengalami berbagai pasang surut. Pertanian yang selalu digaungkan sebagai dasar perekonomian kerakyatan yang pada awalnya sangat diandalkan dalam menopang sendi-sendi pembangunan bangsa, akhirnya mengalami berbagai gejolak di dalamnya. Penyebabnya adalah dari berbagai kebijakan negara yang justru menciptakan keadaan yang secara tidak sengaja malah tidak menguntungkan bagi petani. Kebijakan struktural yang seharusnya diharapkan banyak pihak mampu menyele-

saikan masalah pertanian di Indonesia malahan harus terjebak dengan berbagai persoalan kompleks yang tidak menguntungkan petani sebagai pelaku pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya memberatkan petani dan menguntungkan bagi negara dan pengusaha yang terlibat dalam modernisasi pertanian. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa masalah dialektika pertanian di Indonesia tidak terlepas dari unsur kesejarahan yang mempengaruhinya.

Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Koentjaraningrat (dalam Raharjo, 2004) menyebutkan semenjak keberadaan manusia kira-kira dua juta tahun yang lalu, manusia baru mengenal cocok taman sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sebelumnya cara hidup manusia masih dalam taraf *food gathering economics* seperti berburu, menangkap ikan dan meramu. Dengan berkembangnya cocok tanam memaksa manusia untuk hidup menetap disuatu tempat untuk menjaga dan menunggu panen. Proses awal yang dilakukan manusia telah memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan dan tata perilaku bersama yang terwujud dalam pola kebudayaan bercocok tanam. Sehingga tidak mengherankan seperti disebutkan Childe, peristiwa penemuan cocok tanam merupakan revolusi kebudayaan. Makna revolusi kebudayaan juga berkaitan dengan kenyataan bahwa dengan ditemukannya pertanian bukan hanya menyebabkan munculnya daerah desa namun juga lebih lanjut terhadap munculnya kota.

1. Pertanian pada masa kerajaan kuno

Manakala merunut alur sejarah pertanian di Indonesia bahwa pertanian yang berkembang saat sekarang ini tidak terlalu jauh parameternya sistem pertanian pada masa taman paksa 1830-1870 atau bahkan pada zaman pemerintahan Mataram. Ini berarti bahwa model pertanian yang dilakukan petani sama sekali tidak mengalami perubahan selama 600 tahun ini. Yang dimaksudkan adalah bahwa mental petani dalam melakukan pekerjaan pertanian yaitu dengan mengolah dan menanami tanahnya selalu merupakan fungsi atau berkaitan dengan motivasi petani dan berhubungan dengan harapan yang ada. Dan harapan ini selalu berhubungan dengan apa yang dijanjikan pemerintah.

Adalah hal yang menarik dengan apa yang disebutkan Raffles, bahwa pemerintahan Belanda sama sekali acuh tidak acuh mengenai masalah pertanian dan petani khususnya. Karena tambahnya kesalahan yang dilakukan pemerintah Belanda terlalu banyak terkait dengan perantara sehingga aspek pertanian yang dibangun lebih bersifat feodal dan menekan (Mubyaro, 1987; Booth, 1988).

Hal sebaliknya dapat dicermati sebelum pemerintahan Belanda datang, dimana sistem bertanam padi dengan pola pengairan merupakan hal yang su-

dah dipraktekan secara turun termurun. Karenanya, beberapa ahli asing melihat bahwa sebelum abad masehi penduduk Melayu di Jawa mengolah padi sawah pada pengairan yang berteras-teras.

Bertani adalah kehidupan pokok rakyat dan pemerintah memperoleh sumber penerimaannya semata-mata dari pertanian. Penerimaan negara terutama terdiri atas pembayaran *in natura* dan jasa-jasa tenaga penggarapa tanah. Ini berarti bahwa sebagai *kawula* rakyat kecil harus menyisihkan sebagian hasil panen dan waktunya bagi keperluan raja, kerajaan dan atasan. Pembayaran inilah sebagai bukti bahwa mereka merupakan *kawula* dari suatu negara dan dianggap sebagai imbalan dari serangan musuh atas gangguan keamanan lainnya. Menurut Pigeaud (dalam Hutapea,1986) adanya lapisan yang muncul dalam masyarakat sangat penting peranannya di dalam ekonomi kerajaan-kerajaan Jawa, kehilangan statusnya sebagai warga masyarakat yang bebas antara lain oleh karena perang, dihukum oleh raja atau tidak mampu membayar hutang. Adanya lapisan dengan jumlah anggota yang besar lebih memudahkan raja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Bila menyimak campur tangan pemerintah secara langsung dalam memajukan pertanian realitanya samasekali tidak ada. Pertanian adalah urusan petani. Pemerintah tidak menganggap perlu dan rupanya juga tidak dianggap perlu untuk mengetahui hal ihwal masalah pertanian. Sehingga pada masa kerajaan tidak terbayangkan bahwa para raja atau pangeran berkunjung ke desa dan berdialog dengan petani. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa, petinggi atau tokoh di desa. Hirarkhi pemerintahan cukup berlapis dan otonom amat kentra pada semua tingkat walaupun semua pejabat selalu berorientasi ke atas, yaitu berusaha menyenangkan pejabat atasannya. Hal ini barangkali tidak terlepas dari analisis yang dilakukan Wittfogel yang membedakan pola birokrasi kerajaan Mataram dengan birokrasi negara-negara Timur berhubungan dengan masalah pertanian. Perbedaan antara birokrasi kerajaan Mataram dan negara Timur dapat dilihat dari hubungan antara petani dan pemerintah di atasnya. Keadaan lingkungan di Jawa, memungkinkan petani untuk membangun sendiri jaringan irigasi dengan memanfaatkan mata air serta aliran sungai. Hal ini berbeda wilayah dengan negara-negara Timur dimana pertanian sangat tergantung dengan jaringan irigasi besar yang memanfaatkan sungai besar. Pembangunan jaringan irigasi yang besar memungkinkan munculnya birokrasi dalam proses pembangunan. Pemilikan ini menyebabkan para petani tergantung kepada birokrasi yang bersangkutan.

Kendatipun demikian, ada sisi lain yang menyebabkan munculnya kezaliman kerajaan Mataram dimana terletak di dalam tuntutan yang berat dari penguasa kerajaan kepada petani. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari faktor historis kerajaan sebelumnya. Atas alasan inilah Pigeaud menyebut kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang zalim dalam masalah hubungan kerajaan dengan petani. Kerajaan Mataram mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari kerajaan sebelumnya dan atas dasar kekuasaan tersebut dapat memberikan tuntutan serta te-

kanan yang lebih berat kepada para petani.

2. Pertanian Pada Masa Penjajahan

Pada masa ini sangat terkait dengan periodisasi di bawah struktur kolonialisme pemerintahan Belanda yang lebih kurang 350 terhadap kompleksitasnya pertanian di Indonesia. Pada masa ini periodisasi tersebut dapat dibagi kepada : (1) zaman VOC 1600-1800 (2) zaman kekacauan dan ketidakpastian 1800-1830 (3) zaman tanam paksa 1830-1850 (4) zaman peralihan ke liberalisme 1850-1870 (5) zaman liberalisme 1870-1900 (6) zaman politik etik 1900-1930 (7) zaman dipresi dan perang 1930-1945 (Booth, 1988; Atmosudirdjo, 1983).

Pembagian periode ini memberi gambaran umum atas keadaan pertanian di Indonesia selama 350 tahun jelas menunjukkan model pertanian yang semuanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya bagi penjajah. Pada masa ini format pertanian sangat dipengaruhi oleh model tanam paksa yang cukup besar pengaruhnya memberi dampak bagi petani. Dengan pola tanam paksa yang terjawatahkan misalnya dalam sistem persewaan telah menyebabkan berkembangnya kapitalisme di kalangan petani yang tidak boleh menjadi kapitalis. Artinya yang menjadi kapitalis adalah para pengusaha Belanda atau orang Eropa yang membawa modal pengetahuan dan ilmu sistem perekonomian. Hal inilah yang disebutkan Boeke asal mula dualisme yang bertimpakan dengan sistem ekonomi tradisional yang telah berkembang sebelumnya.

Pada masa penjajahan kedudukan dan peranan petani pada hakekatnya tidak berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu memenuhi berbagai kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah. Kendatipun demikian, pada masa ini beban menjadi semakin berat terutama pada masa *cultuurstelsel*. Dasar pemikiran ini yang melatarbelakangi tanam paksa tersebut khususnya penanaman tebu sebagai salah satu jalan untuk menumbuhkan industri gula yang stabil yang stabil, efisien dan menguntungkan dengan memaksa petani mengerjakan berbagai pekerjaan dengan nilai upah yang rendah. Konsekuensi tersebut bermuara dengan berlangsungnya tekanan terhadap petani, secara tidak langsung telah mempertajam perbedaan sosial ekonomi. Elson dalam tulisannya menyebutkan di sekitar pertengahan abad kesembilan belas petani terbagi menjadi tiga lapisan. Pertama, sekelompok kecil petani yang mempunyai hak atas tanah yang luasnya memberikan hasil yang melebihi kebutuhan konsumsi sendiri dan yang penggarapnya. Kedua, petani dengan mereka yang memiliki luas tanah yang memberikan produksi untuk keperluan sehari-hari dan dikerjakan juga tenaga keluarga sendiri. Ketiga, para petani yang tidak bertanah, dan menggantungkan hidupnya pada lapisan di atas atau bekerja sebagai pekerja prabikan (Elson, 1984).

Di masa penjajahan Belanda disebutkan, guna melayani sistem tanam paksa dihidupkan kembali komunalisme desa. Sistem tanam paksa yang dikembangkan dengan mengkombinasikan dipertahankannya kekuasaan feodal tuan-tuan tanah dengan kepentingan kolonialisme dari luar. Dengan pola ini petani mendapat

tanah garapan tanam paksa yang sama besarnya, dan statusnya sebagai petani hamba yang menyerahkan tenaga kerjanya untuk tanaman-tanaman komunitas yang diharuskan pemerintah Hindia Belanda sebagai jaminan pembayaran pajak. Dan bersamaan dengan hal tersebut kelas tuan tanah diperlemah.

Tahun 1870 merupakan tahun dimana proses liberalisasi lewat sistem perkebunan yang membawa perubahan besar dimana semakin luasnya pemilikan perorangan atas tanah. Artinya, ruang publik semakin kentara, dan ruang individu semakin menguat, dengan polarisasi yang dikembangkan di daerah pedesaan. Sehingga yang terjadi dimana pelapisan sosial semakin kuat, dengan golongan pemilik tanah beserta para pejabat pemerintah yang pada umumnya penguasaan tanah sebagai lapisan teratas. Tidak berhenti di sini saja, juga mulai berlangsung proses marjinalisasi petani, karena kebutuhan tenaga kerja upah di pabrik perkebunan (Setiawan, 2003)

Pada masa inilah involusi pertanian memasuki masa liberalism. Sehingga petani tanam paksa dianggap telah mendorong petani bekerja lebih giat untuk meningkatkan produksi pertanian. Setelah berakhirnya masa liberal pada tahun 1900 dan mulai memasuki abad ke-20 berkembanglah apa yang dinamakan dengan politik etik. Keuntungan yang diperoleh Belanda kemudian dikembalikan sebagian kecil bagi kalangan pribumi, terutama petani. Pada aras inilah terkenal program pendidikan, pengairan dan transmigrasi.

3. Pertanian Sesudah Masa Kemerdekaan

Pada masa ini gambaran pertanian mengalami pergeseran yang cukup signifikan dengan masa-masa sebelumnya. Soemardjan (dalam Mubyarto, 1987) lewat tulisannya memperlihatkan bahwa pada periode sebelum pembaharuan agraria tahun 1918 petani hanya mempunyai kewajiban dan tidak memiliki hak, antara tahun 1918 dan 1951 petani memiliki keduanya kewajiban dan hak, dan sesudah penghapusan pajak tanah 1951 petani hanya memiliki hak-haknya dan hampir tidak memiliki kewajiban apapun.

Pada masa ini pulalah sistem gotong royong diperkenalkan di daerah desa yang melibatkan semua warga desa dalam proses pembangunan, terutama pembangunan pertanian. Gotong royong yang dikembangkan tidak hanya mencakup bagi mereka yang mempunyai sawah namun juga bagi mereka yang tidak ada sawah ikut melakukan kegiatan gotong royong dalam usaha pembangunan pertanian. Warisan struktural setidaknya tidak berubah, bentuk dan struktur menjadi tidak mengherankan sebagai berubah kapitalisme dengan apa yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Secara tidak langsung warisan kolonialisme tidak hanya dihampiri pada masa kolonial Belanda namun juga terus terjadi setelah masa kemerdekaan. Ini cukup kentara terjadi manakala pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan sistem pertanian ketimbang kepada perubahan sistem agraria.

Perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari kenyataan masa sebelumnya. Pertanian di Jawa misalnya selama masa penjajahan melibatkan dua lingkungan. Lingkungan yang pertama lingkungan penguasa yaitu tanaman-tanaman perdagangan dengan dukungan pemerintah di satu pihak dan padi milik petani di pihak lain. Lingkungan kedua adalah lingkungan petani, yaitu lingkungan pembayar pajak, yang bebas dari tanaman-tanaman perdagangan dan selama beberapa kurun waktu cukup panjang mengelola sendiri jaringan pengairan. Pada dasawarsa pertama dari abad ke dua puluh, sejalan dengan politik etis, sebagian dari lingkungan ini kehilangan kebebasannya dimana pembangunan pembangunan jaringan pengairan berada dalam ranah pemerintah di bawah dinas pengairan.

Dipresi ekonomi pada masa tiga puluhan, pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan pengusaha. Pada tahap ini arah pertanian lebih ditekankan pada produksi pangan. Sehingga sistem pembangunan jaringan irigasi mutlak sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pemerintah berupaya membangun jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi padi. Sehingga berbeda dengan apa yang terjadi pada masa penjajahan, jaringan irigasi di lingkungan penguasa kini lebih dimanfaatkan guna mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi. Hal ini bahwa dinas pengairan pada masa lalu mengarahkan pada kebijakan terutama kepentingan pabrik tebu, namun kini menjalankan cara yang baru untuk memperhatikan praktik yang masih aktif dan juga memperhatikan kepentingan petani.

Dalam bidang produksi pertanian, petani mengalami perubahan sikap penguasa yang berbeda satu sama lain. Zaman Belanda (zaman normal oleh petani karena politik pertanian tidak begitu banyak berubah dalam waktu yang cukup lama), zaman Jepang (yang keras tetapi relatif pendek) dan zaman Republik.

Pada zaman sebelum Jepang, pejabat pertanian bangsa Belanda maupun bangsa Indonesia bersikap paternalistik terhadap para petani dan masyarakat umumnya. Artinya pejabat menganggap dirinya sebagai bapak, dan petani sebagai anak yang belum dewasa yang selalu berada dibawah pengawasan bapak. Apa yang menurut pendapat pejabat baik, maka baik pula bagi petani. Pada zaman Jepang seperti juga diketahui, pertanian lebih diarahkan pada upaya mendukung peperangan. Pada zaman Jepang dikenang oleh petani sebagai zaman yang kejam dengan penyiksaan.

Apa yang tergambar pada masa pendudukan Jepang, pola pertanian yang berkembang selanjutnya juga tidak selalu mengarah kepada keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap petani. Lewat salah satu programnya Bimas gotong royong secara tidak sengaja berkembang pola pembangunan pertanian *top down* yang menyebabkan kemerdekaan petani dan pemaksaan program pertanian cukup kuat terasa. Melalui paradigma yang berorientasi produksi dan mengejar pertumbuhan, pemerintah secara tidak langsung mematikan otonomi

petani dalam pembangunan pertanian. Digaungkannya revolusi Hijau pada masa pemerintahan orde baru misalnya menjadi bukti bahwa masalah pertanian erat kaitannya dengan aspek ekonomi dan juga politik. Revolusi hijau yang didewakan pemerintahan orde baru sarat dengan unsur kontrol dan dominasi. Lewat revolusi hijau dan modernisasi pertanian telah menggusur segenap bentuk pengetahuan petani yang dianggap tradisional ke cara-cara yang modern. Cara-cara bertani beserta benih-benih digantikan secara paksa dengan cara modern, dan bersamaan dengan itu pula telah menghancurkan formasi sosial non kapitalistik. Tidak berhenti di situ saja, revolusi hijau ternyata juga telah menggantikan tradisi gotong royong dengan kapitalisme dan industrialisasi pertanian. Sehingga revolusi hijau telah menggusur segenap bentuk proses budaya politik pedesaan berbasis nilai lokal kepada model modernisasi politik modern yang mematkan sisi lokalitas (Fakih, 2004).

Model modernisasi pertanian lewat input modal besar-besaran yang diperkenalkan masa pemerintahan orde baru dengan paradigma pertumbuhan sebagai jargon ekonomi global dalam kenyataannya tidaklah membawa keuntungan bagi petani. Malah yang diuntungkan adalah pemilik modal dan juga elit desa yang secara serta merta menjadi pemanfaat dari jerih payah keringat petani.

Hal yang sama juga seperti disebutkan Soetrisno, apa yang dilakukan pemerintah lewat program revolusi hijau di dekade 1970-an selain mampu mencapai pembangunan pertanian skala makro dengan peningkatan produktivitas sub-sektor pertanian pangan, namun juga pada level mikro telah menimbulkan masalah tersendiri. Melalui revolusi hijau Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Akan tetapi juga melalui program revolusi hijau telah memunculkan kesenjangan antara daerah kawasan padi pada dan non-padi di daerah pegunungan misalnya. Sekaligus lewat program ini secara tidak langsung telah mematkan pengetahuan lokal yang cukup arif dalam menjaga hubungan manusia dengan alam harus tergantung dengan logika efisiensi dan keberpihakan pada teknologi modern (Soetrisno, 2002). Logika penerapan revolusi hijau juga diarahkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun dalam kenyataannya keberhasilan lewat revolusi pertanian masih menjadi perdebatan panjang. Karena apa yang dicita-citakan melalui revolusi hijau bermanfaat bagi pembangunan pertanian malah menyisakan cukup banyak kesenjangan yang muncul dari terjadinya polarisasi kesenjangan antara petani kaya dan miskin.

Historis perkembangan pembangunan pertanian sejak masa orde lama, hingga runtuhnya orde baru tidak jauh berbeda dengan masa penjajah belanda lewat dominasi pemerintah atas program pertanian yang secara lahiriah bukan hanya menguntungkan pengusaha sebagai pemilik modal namun juga pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Dan seperti disebutkan banyak pengamat tidak sama sekali menguntungkan petani. Kekuatan struktur ekonomi global dunia telah merubah secara radikal kebijakan pembangunan pertanian berbasis rakyat. Melalui ketergantungan yang dilakukan pemerintah kepada lembaga asing,

seperti IMF seperti disebutkan Setiawan (2003), telah mengarahkan kebijakan pertanian untuk semakin pro-pasar bebas dan secara sepihak mematikan nilai-nilai lokal yang dibangun petani dalam pembangunan pertanian berbasis desa. Sehingga bila mencermati lebih jauh ternyata warisan pembangunan pertanian dari masa kolonial dan orde baru kini semakin kompleks dengan mekanisme baru berwajah neo-imperialisme.

C. Paradigma Pembangunan Pertanian

Dalam upaya memajukan sektor pertanian ada beberapa hal yang telah dikembangkan pemerintah dari intensifikasi hingga restrukturisasi pertanian secara global. Pada dasarnya ada beberapa alasan mendasar yang dibangun manakala sektor pertanian mendapat prioritas dalam format pembangunan sekarang ini. Pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. Karena sebagian besar pembelinya adalah masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk di negara-negara berkembang, maka tingkat pendapatan mereka harus ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Kedua, untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai memenuhi kebutuhan pokok buruh dan pegawai. Hal ini dapat dicapai manakala produksi pertanian, terutama pangan dapat ditingkatkan sehingga harganya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketiga, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, dan karena itu produksi bahan industri memberikan basis bagi pertumbuhan industri sendiri (Rahardjo, 1984).

Dengan mengacu pada perspektif pembangunan pertanian yang seharusnya mendapat posisi urgen dibandingkan prioritas industrialisasi terkait dari suatu logika bahwa sektor pertanian memiliki kemampuan ekonomis untuk meningkatkan surplus. Selanjutnya, apabila cara produksi pertanian dapat lebih dipermudah, dengan teknologi, produktivitas yang lebih tinggi dan hasil pertanian pada bidang pangan, maka beban tenaga kerja sektor pertanian dapat digeser ke sektor industri. Artinya sektor pertanian dinilai merupakan sumber tenaga kerja bagi sektor industri.

Perubahan paradigma pertanian yang mengacu pada pembangunan pertanian secara holistik menjadi fokus utama yang harus terbangun dimana tujuan paradigma pertanian harus lebih menjamin keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan baik dalam lingkup keluarga dan juga lingkup negara. Untuk mencapai target tersebut ada beberapa pandangan penting yang harus dilakukan negara berhubunga dengan paradigma ini sendiri. Soekartawi (1995) menjelaskan, paradigma pembangunan pertanian harus dirubah dari pendekatan sentralisasi ke desentralisasi, pendekatan komoditas ke sumber daya, dari pendekatan pendapatan petani ke peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dari skala usaha pertanian subsistem ke komersial, dari padat karya ke mesin, dari komoditi

primer ke komoditi yang mempunyai nilai tambah tinggi, dari pendekatan tarik tambang ke dorong gelombang dan dari dominasi pemerintah ke partisipasi swasta yang lebih besar.

Mengacu dari sentralisasi ke desentralisasi diharapkan pembangunan pertanian di daerah perlu diberikan wewenang yang lebih luas dalam merencanakan pembangunan. Kekuatan nilai lokal yang ada pada masyarakat harus menjadi penyelaras dari berbagai pijakan yang memuat semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun sektor pertanian. Pembangunan pertanian tidak hanya berpikir parsial, tetapi juga struktur dan berbagai elemennya saling terkait satu sama lain. Pembangunan pertanian perlu memperhatikan skala usaha. Artinya petani kecil perlu diarahkan berusaha pada skala usaha yang menguntungkan. Aspek manajerial terus menjadi penting dalam meningkatkan produktivitas. Karena logika yang berkembang bukan *doing the right things* saja, melainkan juga memperhatikan *doing the things right*.

Pada tingkat skala yang lebih makro format pembangunan dengan pendekatan tarik tambang yang pernah dipraktekkan pemerintah lewat PJP I dimana investasi diarahkan di daerah yang mempunyai potensi SDA yang harus dikembangkan, sehingga memunculkan ketimpangan pembangunan bagi daerah yang tidak memiliki SDA memadai. Perspektif daerah gelombang diarahkan bagi daerah yang tertinggal perlu didorong untuk dapat berkembang sejajar dengan daerah yang lebih maju.

Dengan konsekuensi yang dikembangkan tersebut partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian harus semakin digalakkan. Bila hal ini dapat dilakukan secara komprehensif akan mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan. Sehingga secara bertahap akan dilakukan revitalisasi pertanian tradisional ke arah industrialisas semakin memungkinkan untuk menjadi *term* pembanguna pertanian selanjutnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ginanjar (dalam Salikin, 2003:73-74) menyebutkan ada beberapa kriteria untuk mewujudkan pertanian berbudaya industri:

1. Pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan (bukan instuisi atau kebiasaan saja) sehingga kebutuhan terhadap perkembangan dan kualitas informasi akan semakin tinggi.
2. Kemajuan teknologi merupakan instrument utama dalam pemanfaatan sumber daya.
3. Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa.
4. Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumber daya sehingga menghemat biaya pengelolaan sumber daya.
5. Mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan.
6. Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol.
7. Perekrayaan harus menggantikan ketergantungan pada alam sehingga setiap produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan pasar.

Format pembangunan pertanian yang tergambarkan di atas berupaya menggeser paradigma pertanian berwajah subsisten menuju pertanian berbudaya industri. Kendatipun demikian Satria (1997), menjelaskan model transformasi ke arah pertanian berbudaya industri tidak mungkin dilakukan secara revolusioner. Lompatan drastis dari masyarakat subsiten ke masyarakat industri justru akan merugikan karena dapat berakibat fatal, yakni terjadinya aliansi atau keteransingan budaya. Akan tetapi yang diperlukan adalah rekayasa transformasi berupa akselerasi atau model evolusi yang dipercepat, dimana laju pergerakan dipercepat melalui aplikasi teknologi baru disertai dengan upaya penyiapan kemapanan dan kematangan masyarakat untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi tersebut. Sehingga yang patut dipahami bahwa model transformasi pertanian berbudaya industri tidak salah dipahami serta merta dimaknai dengan pembangunan pabrik industri berskala besar, gedung industri pengolahan hasil pertanian, akan tetapi pola ini lebih terarah pada transformasi pola pikir, pola tindakan, dan sikap dari petani tradisional kearah petani modern.

Dengan apa yang dilakukan pemerintahan orde baru lewat program Repelita dan Pelita pembangunan nasional selama lima tahun telah menempatkan pembangunan sektor pertanian “terpinggirkan” oleh pembangunan sektor-sektor lainnya. Faktor inilah yang melandasi format pembangunan pertanian menjadi prioritas utama dari program pemerintahan reformasi kendatipun masih terdapat banyak kelemahan dalam upaya memberdayakan kehidupan petani sebagai pelaku pembangunan.

Suryana (1997) dalam analisisnya untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian sebagai sektor yang modern, tangguh dan efisien harus melandasi empat hal :

1. Memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Sumber daya pertanian meliputi lahan, air dan perairan secara umum, kelautan, plasma nutfah, sumber daya genetika dan sumber daya energy. Pengelolaan sumber daya tersebut harus memenuhi prinsip ekonomi dan efisiensi serta mengacu kebutuhan pasar.
2. Menetapkan diversifikasi secara komprehensif baik dari dimensi vertikal, horizontal. Kunci sukses dalam pengembangan diversifikasi pertanian adalah pemanfaatan teknologi spesifik lokasi, ketersediaan prasarana wilayah pengembangan dan keberadaan lembaga pendukung yang memadai, termasuk informasi pasar dan standarisasi produk. Diversifikasi bukan hanya pada kegiatan produksi, tetapi juga alam pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.
3. Menerapkan rekayasa teknologi maju dan spesifik lokasi. Kata kunci di dalam hal ini adalah maju dan spesifik lokasi, mengingat sumber daya pembangunan pertanian yang ada sangat beragam. Dengan penerapan teknologi

maju yang beradaptasi dengan kondisi lokal spesifik, maka upaya peningkatan efisiensi usaha tani yang berdaya dapat dilakukan secara maksimal.

4. Meningkatkan efisiensi sistem agrobisnis dan agroindustri agar mampu menghasilkan produk pertanian berdaya tinggi serta mampu memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara berimbang.

Dengan demikian dari apa yang dikembangkan di atas, agar paradigma tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan, dibutuhkan kebijakan dan keberpihakan pemerintah atas sektor pertanian yang pada dasarnya menjadi penyumbang devisa terbesar dalam pembangunan dan sekaligus merupakan mata pencaharian yang masih dominan dilakukan masyarakat dalam mengatasi krisis global. Karena apa yang sering muncul dari permasalahan pertanian tidak terlepas bagaimana pemerintah menghampiri sektor pertanian dan petani sendiri sebagai pelaku pembangunan. Rekonstruksi sektor pertanian bukanlah hal yang mudah, khususnya setelah dijepit dengan sekian banyak kebijakan pemerintah yang memuat sektor ini semakin terdesak. Yudistika (2003) menyebutkan terdapat dua masalah besar yang masih menggantung pada sektor pertanian. Pertama, kepemilikan lahan yang sangat kecil. Pada tahun 1980-an seperti penelitian yang dilakukan Hayami dan Kikuchi melapokan kepemilikan lahan rata-rata di Jawa kurang dari 0,5 hektar. Kini rata-rata lahan tinggal 0,25 hektar. Dengan struktur kepemilikan lahan seperti ini jelas atribut-atribut semacam efisiensi dan produktivitas masih jauh dari yang diharapkan. Kedua, menyingkirkan kondisi-kondisi yang menyebabkan sektor pertanian selalu kalah dan tersingkirkan oleh sektor lain. Berhadapan dengan alam, teknologi dan kelembagaan, sektor pertanian selama ini hampir selalu berada pada situasi subordinat, terdesak secara mengenaskan. Bila berhadapan dengan pelaku ekonomi lainnya, kondisi petani selalu kurang mujur akibat kelembagaan ekonomi yang asimetris sehingga biaya transaksi nyaris seluruhnya menjadi beban petani.

Dengan atribut penguasaan lahan yang sangat timpang hal yang dapat dibayangkan adalah bagaimana akhirnya petani terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mencari sumber pendapat tambahan di luar sektor pertanian (*off-farm*). Kondisi yang sudah dapat dibayangkan ini akan selalu menjadi pemandangan klasik yang harus dihilangkan dengan mengupayakan kebijakan pembangunan yang dibangun negara dapat merubah sektor pertanian dan petani sendiri menjadi aktor utama dalam pembangunan pertanian dan bukan malah sebaliknya. Karena apa yang digambarkan Soetomo (1997) dalam mensymbolisasikan petani sebagai manusia yang kalah cukuplah berasal. *Pertama*, kekalahan yang datang dari alam. Ini sesuatu yang sangat ironis bila mengingat pada awalnya kultur bercocok tanam lahir berkat anugerah kekayaan alam. Tetapi ini bisa pula dipahami karena ketergantungan petani pada alam sebenarnya menciptakan ancaman di dalam dirinya sendiri. *Kedua*, terbentuknya masyarakat dan lembaga beserta sistem kekuasaan dan politik yang ada di dalamnya. Kelembagaan pertanian modern, misalnya telah membuka babak baru di mana buruh

tani bergantung pada majikannya, pemasaran produk pertanian di bawah hukum permintaan dan penawaran pasar dan bahkan harga jual produk pertanian selalu terancam oleh rekayasa praktek ekonomi makro. *Ketiga*, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas ternyata juga tidak tercapai. Justru sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi berubah menjadi bentuk dominasi baru yang tidak kurang menindas. Kondisi ketiga inilah yang selalu akhirnya menikam petani secara perlahan dan nyaris tidak dapat menyelamatkan diri terlebih lagi dengan *platform* model pembangunan pembangunan pertanian yang tidak memihak petani.

Artinya, paradigma pembangunan pertanian akan selalu menjadi menjadi sebuah khalayan dari suatu paradigma semata manakala pemerintah belum mampu merubah pola dan bangunan dari kebijakan pertanian yang lebih konsisten dan terpola dengan tetap melihat sektor pertanian sama dengan sektor lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani : Sisi Lain Paradigma Pembangunan Pertanian

Pada dasarnya terminologi pertanian berkelanjutan sebagai padanan istilah agroekonomi pertama kali dipergunakan sekitar awal tahun 1980-an oleh pakar pertanian FAO. Agroekonomi sendiri mengacu pada modifikasi ekosistem alamiah dengan sentuhan campur tangan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serat dan kayu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Conway dalam Salikin juga menggunakan istilah pertanian berkelanjutan dengan konteks agroekosistem yang berupaya memadukan antara produktivitas , stabilitas dan pemerataan (Salikin, 2003). Jadi semakin jelas bahwa konsep agroekonomi dan pertanian berkelanjutan adalah jawaban bagi kegamangan dampak revolusi hijau yang antara lain ditengarai oleh semakin merosotnya produktivitas pertanian. Revolusi hijau memang dipandang suksse melakukan rekayasa pertanian lewat modal teknologi, namun juga sekaligus menyimpan berbagai problematik dari masalah kemanusia hingga rusaknya ekosistem alam.

Eksistensi konsepsi pertanian berkelajutan bukanlah sesuatu yang baru. King menuliskan baha teknik usaha tani dengan metode organik atau pertanian permanen yang mengintegrasikan pengelolaan kesuburan tanah juga telah dilakukan oleh para petani di dataran Cina, Jepang dan Korea beberapa abad yang lalu. Dengan demikian isu paradigma pertanian berkelanjutan yang berkembang sekarang sebenarnya merupakan reaktualisasi untuk mencari model pengelolaan pertanian yang berbasis alam. Kegagalan pertanian modern telah merubah cara pandang untuk melalukan rekayasa pertanian kembali ke alam.

Soekartawi (1995) dalam pandangannya menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan pembangunan pertanian di Indonesia harus menerapkan model pertanian berkelanjutan. Pertama, sebagai negara agraris, peranan sektor perta-

nian Indonesia dalam sistem perekonomian nasional masih dominan. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto adalah sekitar 20% dan menyerap 50% lebih tenaga kerja pedesaan. Dari 210 juta penduduk Indonesia hampir 150 juta orang bertumpu pada sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, sebagai negara agraris agrobisnis dan agroindustri memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung pembangunan sektor lainnya. Pengalaman masa lalu menunjukkan, yakni pada saat sektor industri dan perbankan mengalami krisis ekonomi, sektor agrobisnis dan agroindustri malah mengalami kemajuan akibat krisis mata uang AS di dunia melemah. Ketiga, sebagai negara agraris, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi keharusan agar sumber daya alam yang ada sekarang ini dapat terus dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Secara konseptual pendekatan pertanian berkelanjutan merupakan pola dan cara pandang yang harus dikembangkan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara sinergis. Pendekatan ekonomi berkelanjutan berbasis pada konsep maksimalisasi aliran pendapatan antargenerasi, dengan cara merawat dan menjaga cadangan sumber daya atau modal yang mampu menghasilkan suatu keuntungan. Upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya yang langka menjadi keharusan dalam menghadapi berbagai isu ketidakpastian baik aspek alam maupun non alam. Konsep sosial berkelanjutan berorientasi pada manusia dan hubungan pelestarian stabilitas sosial dan sistem budaya, termasuk upaya mereduksi berbagai konflik sosial yang merusak. Dalam perspektif sosial, perhatian utama ditujukan pada pemerataan, pelestarian keanekaragaman budaya, serta pemanfaatan praktek pengetahuan lokal yang berorientasi panjang dan berkelanjutan. Tinjauan aspek lingkungan berkelanjutan terfokus pada upaya menjaga stabilitas sistem biologis dan lingkungan fisik dengan bagian utama menjaga kelangsungan hidup masing-masing subsistem menuju stabilitas yang dinamis dan menyeluruh pada ekosistem (Salikin, 2003).

Dari ketiga aspek tersebut memiliki perhatian dan peranan yang sama pentingnya. Aspek ekonomi dan sosial memiliki keterkaitan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan secara merata pada semua lapisan sosial, sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Keterkaitan aspek ekonomi dan lingkungan sebagai pemahaman agar aktivitas ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi tidak membawa dampak eksternalisasi negatif pada lingkungan dan sedapat mungkin menginternalisasikan aspek lingkungan ke dalam tindakan dan putusan ekonomi. Dan keterkaitan aspek sosial dan lingkungan bertujuan memperbaiki kualitas hidup antargenerasi secara merata dan upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian dengan penggunaan input luar secara ekonomis serta memiliki produktivitas tinggi dengan mempertimbangkan sosial ekonomi, budaya dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu dalam pertanian yang berkelanjutan berbagai dukungan sumberdaya

manusia, pengetahuan dan teknologi, permodalan hingga pada produk dalam masalah keseimbangan pertanian dalam pembangunan. Dalam mendukung pertanian berkelanjutan, peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian sangat penting dengan visi dan misi dan tujuan dari pembangunan pertanian. Dalam upaya memanfaatkan teknologi juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta komponen teknologi di dalamnya. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku pembangunan (Husodo, 2004).

Mengacu pada konsep pertanian berkelanjutan sistem pertanian berkelanjutan dapat dilakukan menggunakan empat model. Pertama, sistem pertanian organik, dimana pola pertanian organik merupakan alih tandingan dari kegagalan sistem pertanian industrial. Kedua, sistem pertanian terpadu, merupakan gabungan dari sistem pertanian terpadu konvensional dan sistem pertanian dengan penggunaan teknologi. Pada tahap ini ada hubungan yang saling mengikat untuk dapat memadukan pola pertanian yang tetap menjaga kelestarian alam sekaligus dengan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai ajang peningkatan produksi pertanian dan efisiensi modal. Ketiga, sistem pertanian masukan luar rendah. Pada tahap ini sistem pertanian yang berkelanjutan harus dibangun dengan fondasi sumber daya yang dapat diperbaharui yang berasal dari lingkungan usaha tani dan sekitarnya. Keempat, sistem pengendalian hama terpadu. Terdesak oleh pemenuhan pangan dan kecukupan pangan bagi penduduk yang jumlahnya 120 juta orang mendesak program pencangan pembangunan pertanian yang telah dilakukan pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru melalui program pertanian yang bernama intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi semuanya bermuara pada terjadinya ketidakseimbangan dan penghancuran alam dalam rangka meningkatkan surplus komoditi beras bertaraf internasional sebagai ajang swasembada beras. Di satu titik pertanian Indonesia telah berhasil melakukan swasembada beras, namun disisi yang lain, lewat logika pertumbuhan ekonomi telah merusak kelenstarian alam. Munculnya berbagai seragam hama penyakit pada sektor pertanian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kondisi alam dengan logika kebutuhan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan dan sedikit sekali berpikir alam sebagai sumber daya terbatas.

Berangkat dari paradigma baru pembangunan pertanian, pertanian berkelanjutan merupakan konsep yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus sebagai pijakan dari pemerintah untuk tetap memajukan sektor pertanian sebagai andalan peningkatan devisa negara. Hal ini sangat berlawanan untuk tidak mengulang lagi pola pertanian yang dilakukan pemerintah pada masa sebelumnya, yang secara tidak langsung berpola *top down* sepihak dimana kekuatan pusat menjadi pelaku utama pembangunan yang malah mematikan pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal dalam peningkatan sektor pembanguana pertanian. Pada tahap ini akhirnya yang harus terbangun adanya kesenergian antara pola *top down* dan juga *bottom up* untuk melibatkan secara penuh petani sebagai pelaku pembangunan dan bukan malah menjadi obyek pembangunan.

E. Penutup

Pembangunan pertanian pada masa sekarang dan selanjutnya adalah berupaya untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang harus mampu meningkatkan sumber daya petani dalam menunjang sistem tersebut. Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya terbatas dalam artian peningkatan produktivitas semata, tetapi yang lebih penting bagaimana kebijakan pemerintah menempatkan petani berperan dalam proses pembangunan.

Fakta sejarah memperlihatkan sektor pertanian telah menjadi katub pengaman perekonomian nasional lewat penyerapan tenaga kerja yang teramat besar. Paradoknya, kebijakan pemerintah tidak pernah menempatkan petani sebagai pihak yang harus disantuni. Kebijakan pertanian yang berakar dari masa kolonial dan peninggalan kolonial telah menjadi kisah suram dari kehidupan petani, sehingga masyarakat petani menempati lapisan terbawah dari komunitas miskin di Indonesia.

Mendasari dari fakta inilah paradigma baru pembangunan pertanian yang melibatkan hubungan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan beserta merubah menseset kebijakan dan program pemerintah yang memihak kepada petani mutlak diperlukan. Hal ini cukup mendasar karena sektor pertanian merupakan sektor andalan yang mampu meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Referensi

- Atmosudirdjo, MR. Prajudi, *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Booth, Anne (peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Elson, R. E. 1984. *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry. Impact and Change in an east Java Residency 1830-1940*. Oxford University.
- Fakih, Mansour. 2004. *Bebas Dari Neoliberalisme*. Insist. Yogyakarta.
- Hutapea, S.R. 1986. "Partisipasi Petani Dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier". *Disertasi*. Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Mubyarto. 1987. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Raharjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Rahardjo, M. Dawam. 1984. *Trasformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. UI Press.Jakarta.
- Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Rajawali Press. Jakarta.
- Salikin, Karwan A. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Kanisius.Yogyakarta.
- Satria, A. 197. “Transformasi Ke Arah Pertanian Berbudaya Industri”. Dalam *Analisis C.SIS* . Jakarta.
- Suryana, A. 1997. “Pertanian 2020, Tidak Dapat Dengan Pendekatan Biasa Lagi”. *Kompas*. 7 Maret.
- Setiawan, Bonnie. 2003. *Globalisasi Pertanian*. IGJ. Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soetomo, Greg. 1997. *Kekalaban Manusia Petani: Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Kanisius.Yogyakarta.
- Soekartawi. 1995. “Agribisnis dalam Perspektif Pembangunan yang Berkelanjutan”. *Agrodiklat*. No. 10/Agro/XIII/ Jakarta.
- Yudo Husodo, 2004. Siswono dkk. *Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Swadaya. Bogor.
- Yustika, Ahmad Erani. *Negara VS Kaum Miskin*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003.
- Penulis : Mahmuddin, PPs Sosiologi Fisipol UGM Yogyakarta. Staf Pengajar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

